

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Kota Ternate

1. Sejarah Kota Ternate

Kota Ternate sebelumnya merupakan Kota Administratif yang berada di bawah binaan Daerah Maluku Utara. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Maluku Utara Kota Ternate dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya. Sejak berdiri dari Kota Administratif hingga meningkat status menjadi Kotamadya, secara administratif Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 4 kecamatan selanjutnya tahun 2009 dimekarkan kembali menjadi 7 kecamatan. Pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016, Kota Ternate berkembang menjadi 8 kecamatan dengan kecamatan Ternate Barat sebagai kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016, Pemerintah Kota Ternate membawahi 18 Instutisi Dinas, 10 Institusi Badan Daerah, 3 Kantor Pendukung, 3 Sekretariat, 7 Kecamatan, 11 Puskesmas di Kota Ternate. Di dalamnya terdapat

5.856 Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari 60,41 persennya perempuan dan selebihnya laki-laki. Mayoritas PNS di Kota Ternate merupakan lulusan sarjana, dengan presentase 57,94 persen. Sementara itu, ada 730 orang yang menjabat pada struktur jabatan di seluruh instansi di bawah Pemerintah Kota Ternate, 58,9 persen diantaranya adalah laki-laki.

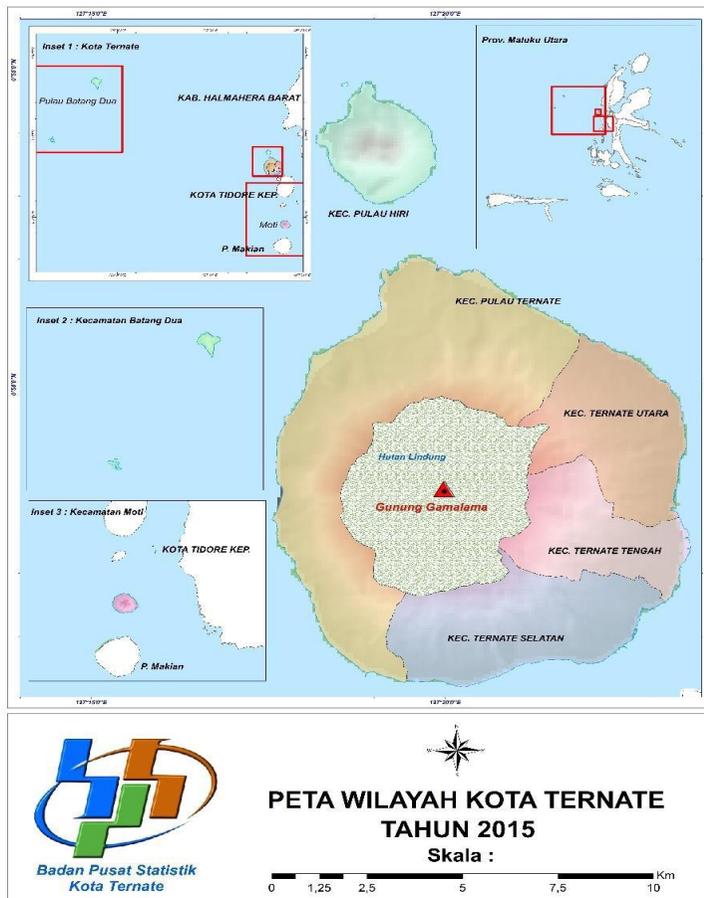
Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 30 orang, dengan 25 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi DIV / S1. Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini merupakan hasil dari Pemilihan Umum tahun 2014 yang terdiri dari 12 fraksi, yaitu PDI-P dan PPP masing-masing sebanyak 4 kursi; Partai Golkar, Demokrat, Nasdem masing-masing sebanyak 3 kursi; Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, PBB, PKB, dan PAN masing-masing 2 kursi, sedangkan PKPI mendapatkan 1 kursi. Pada tahun 2016, ada 8 peraturan daerah yang dihasilkan dan ada 2 peraturan yang sedang diinisiasi oleh DPRD Kota Ternate

2. Keadaan Geografis

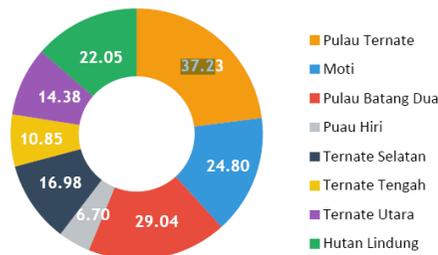
Secara astronomis, Kota Ternate terletak diantara 0025'41,82" - 1021'21,78" Lintang Utara dan antara 12607'32,14" -

127026'23,12" Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh :

- Utara : Laut Maluku
- Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan
- Timur : Pulau Halmahera
- Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi



Luas Kota Ternate adalah 5.709,58 Km², yang terdiri dari daratan 162,03 Km² dan lautan 5.547,55 Km². Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Ibukota Kota Ternate adalah Ternate Tengah dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 77 kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di pulau terbesarnya yakni Pulau Ternate. Pada Pulau Ternate terdapat 5 kecamatan yang berada di sana yakni Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, dan Ternate Barat. Tiga kecamatan lainnya berada di luar Pulau Ternate, sehingga jaraknya dengan Ibukota Kota Ternate cukup jauh. Kecamatan terjauh jaraknya yakni Kecamatan Pulau Batang Dua yang berjarak 121,6 km dari pusat kota. Posisinya berada di Pulau Mayau dan Tifure, yang terletak di tengah perairan Laut Maluku. Luas Wilayah Menurut **Kecamatan di Kota Ternate (km²), 2016** *Total Area by Subdistricts In Ternate (square.km),2016*



Sumber: Pemetaan Wilayah tahun 2009, BPS Kota Ternate
 Source: Area Mapping 2009, BPS-Statistics of Ternate Municipality

3. Keadaan Iklim

Ternate memiliki iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dan memiliki dua musim yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Curah hujan di Ternate adalah signifikan dengan presipitasi, bahkan selama bulan terkering. Selama tahun 2016, Stasiun Meteorologi dan Geofisika Baabullah Ternate mencatat suhu rata-rata tahunan adalah 28°C. Suhu terhangat sepanjang tahun adalah Maret, dengan suhu 33°C. Juni dan Juli adalah bulan terdingin, dengan suhu rata-rata 24°C. Dalam setahun, curah hujan rata-rata adalah 187 mm³. Bulan terkering adalah Februari, dengan 22 mm³ curah hujan. Pada Desember, presipitasi mencapai puncaknya, dengan rata-rata 513 mm³. Perbedaan dalam presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah adalah 491 mm³. Kelembaban udara rata-rata tahunan mencapai 82%. Kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 18 knot, terjadi pada bulan Januari dan Desember

4. Kependudukan

Penduduk Kota Ternate berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 218.028 jiwa yang terdiri atas 110.725 jiwa penduduk laki-laki dan 107.303 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015,

penduduk Ternate mengalami pertumbuhan sebesar 2,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,19. Secara demografi, struktur penduduk Kota Ternate berciri ekspansif yang menunjukkan angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, sehingga menyebabkan penduduk berumur muda lebih banyak. Kota Ternate didominasi oleh sebagian besar penduduk usia muda di bawah 25 tahun, yang mencapai 51,22 persen dari populasi. Hanya 10,82 persen penduduk usia di atas 50 tahun. Hal ini juga menunjukkan proses transisi Kota Ternate menuju bonus demografi, dimana penduduk usia produktifnya bertumbuh cepat. Kepadatan penduduk di Kota Ternate tahun 2016 mencapai 1.345 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup timpang dengan

5. Prasarana dan Sarana (Infrastruktur) Daerah

1) Infrastruktur Sosial Ekonomi Banyaknya usaha industri kecil di Kota Ternate semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 jumlah industri kecil sebanyak 300 perusahaan yang terbagi menjadi : industri pangan berjumlah 60 buah; industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 187 buah; industri sandang, kulit, kerajinan dan umum sebanyak 46 buah serta industri kecil bidang logam sebanyak 7 buah. Dibanding tahun 2003, usaha

industri kecil mengalami kenaikan jumlah sebanyak 118 buah atau sebesar 64,84%. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di sub sektor ini yaitu dari 300 perusahaan yang ada di daerah ini berjumlah 1.190 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis industri, maka yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah kelompok industri kimia dan bahan bangunan yaitu sebanyak 804 orang (67,56%), diikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ternate Tahun 2005 - 2025 39 Bab II dengan industri pangan 208 orang (17,48%); sandang, kulit kerajinan dan umum 160 orang (13,45%) serta industri kecil bidang logam 18 orang (1,51%).

IV.2. Visi dan Misi Kota Ternate

1. Visi Kota Ternate

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi serta dengan mempertimbangkan modal dasar daerah yang dimiliki dalam 20 tahun mendatang, maka Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Ternate tahun 2005-2025 adalah : “KOTA TERNATE MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERBASIS KEPULAUAN” Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Ternate tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kota Ternate. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat

mengetahui tingkat kemandirian kota yang bercirikan kepulauan, yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Supaya terbangun persamaan interpretasi terhadap pernyataan visi tersebut, sehingga diperlukan penjelasan makna pernyataan Visi. Penjelasan masing-masing pernyataan Visi Kota Ternate adalah sebagai berikut: Ternate, Kota Ternate dapat diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum beserta semua potensi yang dimiliki dan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 102 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ternate Tahun 2005 - 2025 Bab III Mandiri, Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan memengaruhinya. Sikap kemandirian harus

dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah; untuk membangun pemerintah daerah yang mandiri mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Maju, Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik pada bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi sumber dayanya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas dengan Kota lain. Adil, dapat diartikan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada

kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang atau dengan definisi lain terkait dengan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa dikurangi dan dilebihkan. Prinsip-prinsip keadilan berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan 'basis necessities' (kebutuhan dasar) kehidupan. Pria dan wanita memiliki akses yang sama dalam perlindungan dan konsistensi perlindungan hukum, partisipasi pengambilan keputusan, penetapan prioritas dan proses alokasi sumber daya. Supaya tercipta keadilan bagi masyarakat Kota Ternate, diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada semua baik yang miskin atau kaya, remaja atau lanjut usia (lansia), kelompok minoritas, cacat, dengan akses yang sama terhadap penyediaan nutrisi, pendidikan, kesempatan kerja, perawatan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi dan lain-lain pelayanan dasar. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ternate Tahun 2005 - 2025 103

Bab III Sejahtera, Sejahtera dapat ditunjukkan dengan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yakni masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat Kota Ternate telah dapat terpenuhi secara lahir dan batin dengan prinsip adil dan merata. Beberapa indikasi kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Ternate adalah

dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; menurunnya tingkat kemiskinan; menurunnya tingkat pengangguran; meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat; meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia yang ditandai dengan terpenuhinya hak social masyarakat yang mencakup pelayanan dasar; sehingga secara keseluruhan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbasis Kepulauan, terdiri dari beberapa pulau yang saling terkoneksi satu sama lainnya serta saling melengkapi dalam rangka mendukung pencapaian Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera. Dengan basis kepulauan maka segala aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan harus didasarkan atas pertimbangan pembangunan berbasis pulau.

2. Misi Kota Ternate

Mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Berkualitas, Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Aparatur Pemerintah yang Profesional.
- b. Mewujudkan Pembangunan Kota Budaya, Kota Maritim dan Sejarah.

- c. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berkualitas.
- d. Mewujudkan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah yang Maju dalam bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kelautan berbasis kepulauan.
- e. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.

IV.3. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Ternate (Bappelitbangda) Kota Ternate

Berdasarkan Pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016. Bappelitbangda Kota Ternate adalah unsur perencanaan penyelenggaraan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappelitbangda Kota Ternate dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;

- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) serta dokumen perencanaan lainnya;
- e. Penyusunan program-program tahunan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
- f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan-perencanaan dengan seluruh perangkat daerah;
- g. Penyusunan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- i. Penyusunan database dalam rangka pengembangan dan kelayakan setiap komponen kebijakan, program dan kegiatan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

- k. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan;
- l. Penyelenggaraan urusan tata usaha badan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

2. Struktur Organisasi

- a. Struktur organisasi Bappelitbangdaberdasarkan terdiri dari : 1.

Unsur Pimpinan yaitu :

Kepala Badan 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :

Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Unsur Pelaksana yaitu :

- Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :

- Sub Bidang Penelitian dan Pendataan
- Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial dan Budaya, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pendidikan Agama dan Kesejahteraan Sosial
- 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

- 3) Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Kimpraswil, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :
- Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam
 - Sub Bidang Perencanaan Permukiman dan Prasarana wilayah
- d. Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :
- 1) Sub Bidang Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Investasi dan Dunia Usaha
Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja yang termuat dalam Peraturan Walikota Daerah No. 24 Tahun 2008.

Berikut ini akan dijabarkan uraian tugas jabatan struktural dalam lingkup Bappeda Kota Ternate: Kepala Bappeda Mempunyai tugas untuk memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan suatu program dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- 2) Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Badan;
- 5) Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Badan;
- 6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program tahunan Badan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 8) laksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Badan;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penelitian, pengumpulan data dan informasi serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dengan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan bidang penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengendalian serta statistik.

Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Penyediaan data proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang lain serta melakukan kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian sebagai bahan perencanaan pembangunan;
- 4) Pelaksanaan pengumpulan, analisis, penyusunan data statistik dan dokumentasi serta penyajian data;
- 5) Pelaksanaan penelitian serta penyusunan konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 6) Penyusunan daftar skala prioritas usulan rencana program/kegiatan;
- 7) Penyiapan bahan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan pembangunan serta menyusun hasil evaluasinya;
- 8) Penyiapan bahan dan data penyusunan kebijakan pembangunan daerah;

- 9) Penyusunan produk-produk penunjang perencanaan pembangunan daerah;
- 10) Pengembangan inovasi baru dalam rangka mencari sistem yang tepat untuk mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi, mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, koordinasi dan pembinaan program perencanaan pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan serta koperasi dan pengembangan dunia usaha. Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna memadukan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
- 5) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya, mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, koordinasi dan pembinaan program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;

- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
- 3) Pelaksanaan pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna memadukan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
- 5) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- 6) Pelaksanaan perencanaan pengembangan sosial budaya;
- 7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

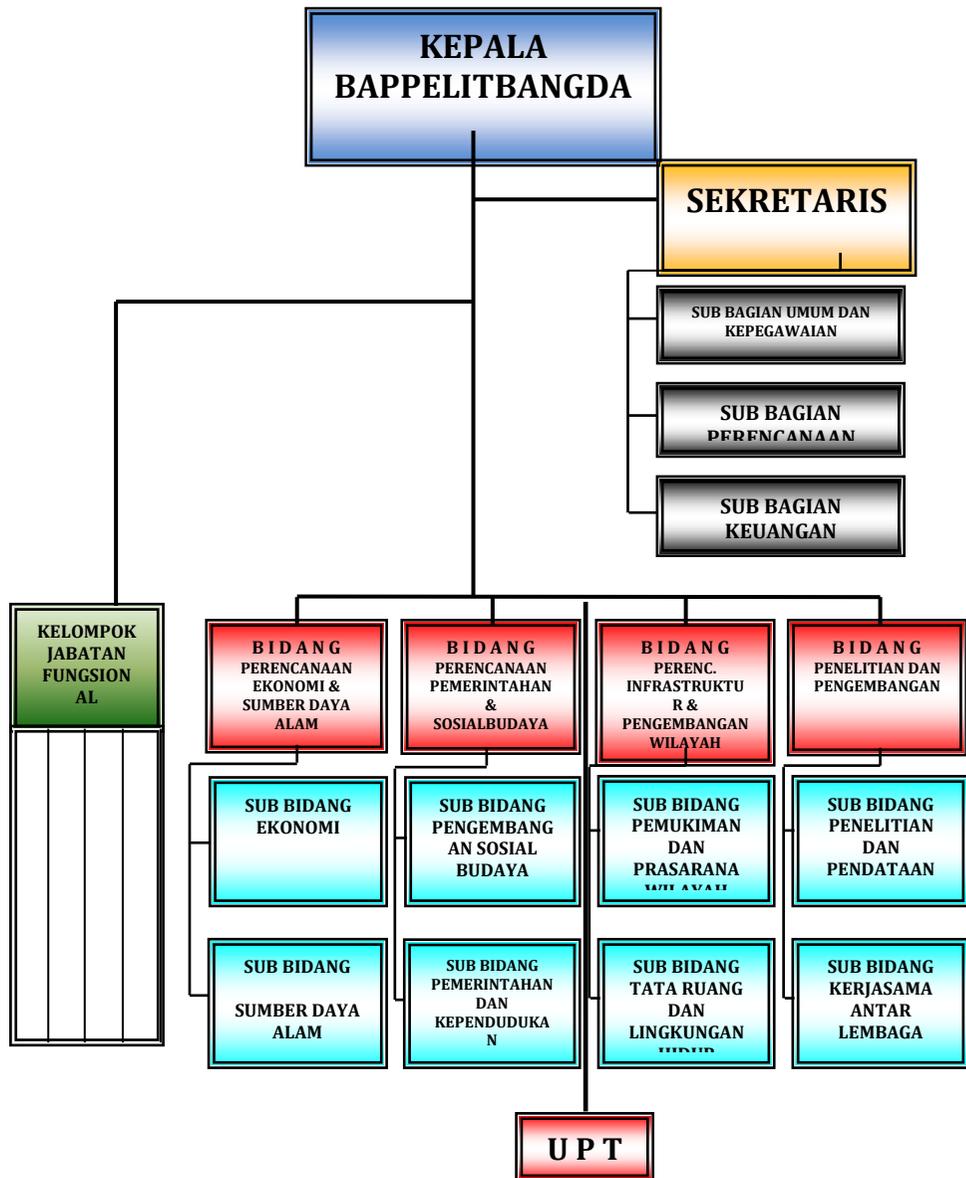
Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Permukiman dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, koordinasi dan pembinaan program

perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan permukiman dan prasarana wilayah. Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- 3) Pelaksanaan pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah serta perumusan langkah-langkah pemecahan masalahnya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah;

- 6) Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pembangunan bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi (Bappelitbangda) Kota Ternate



3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kota Ternate sampai dengan bulan Desember 2010, yang berstatus PNS berjumlah 42 pegawai, sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Susunan Pegawai, Pangkat/Gol.Ruang dan Pendidikan

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/	PENDIDIKAN
	TEMPAT/ TGL. LAHIR	KARPEG	GOL. RUANG	TERAKHIR
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Said Assagaf, SH.MM Banda Naira,13 April 1961	196104131990081001 F.220766	Pembina Utama Muda IV/c	Doktor
2	Muhsin BSA, SP, M.Si Ternate, 02 Maret 1968	19680302 199803 1 005 J. 026149		
3	Gajali M.Teng, SE Ternate, 16 Januari 1964	19641116 199905 1 001 J.026179	Pembina - IV/a	Sarjana Ekonomi
4	Rino Muchsin Pesik, SE.MT Jakarta,09 Juli 1963	19630709 200112 1 002 L.004272	Pembina - IV/a	Magister Teknik
5	Sahil Kimilaha,SP, M.Si Moari,20 April 1967	19670420 200112 1 002 L.005905	Pembina - IV/a	S-2 Magister Sains
6	Lasmyati ,S,Si.,ME Ternate,6 Januari 1979	19790106 200212 2 008 L.070419	Pembina - IV/a	Magister ekonomi Pembangunan
7	Dr. Errny Tjan, SE. M.Si Ternate, 29 September 1968	19680929 199212 2 001 G. 054603	Penata TK.I III/d	Doktor
8	Esty Wulansari, S. Pi Ambon, 3 September 1976	19760903 200312 2 007 L. 220485	Penata TK.I III/d	
9	Nirma Daeng Barang,SE Ternate,13 Desember 1973	19731213 200112 2 003 L.005908	Penata TK.I - III/d	Sarjana Ekonomi
10	M. Saifullah,ST Galela, 3 Nopember 1976	19761103 200212 1 007 L. 139773	Penata TK.I - III/d	Sarjana Tehnik
11	Abubakar Assagaf, SE, Ternate, 11 Juli 1980	19800712 200312 1 005 M. 002705	Penata - III/c	Sarjana Ekonomi
12	Nurriny Esa,SP Ternate,16 Februari 1974	19740216 200701 2 009 N.174571	Penata - III/c	Sarjana Pertanian
13	Ulfa Armen,SE Ternate,2 Nopember 1981	19811102 200604 2 020 N. 095826	Penata - III/c	Sarjana Ekonomi
14	Maknun Albaar, SP Ternate, 20 Desember 1976	19761220 200212 1 008 L. 070420	Penata - III/c	Sarjana Pertanian
15	Ali BS. Abubakar, SE	19820828 200501 1 007	Penata - III/c	Sarjana Ekonomi

	Ternate, 28 Agustus 1982	M. 085374		
16	Rini, SE	19780420 200604 2 012	Penata - III/c	Sarjana Ekonomi
	Ternate, 20 April 1978	N.095817		
17	Abdullah Yasin Kaaba,SH	19750430 200808 1 001	Penata - III/c	Sarjana Hukum
	Ternate,30 April 1975	P.005571		
18	Lidya Rais,SP.MM	19810519 201001 1 002	Penata - III/c	Magister Manajemen
	Ternate, 19 Mei 1981	P.578074		
19	Yakub Abbas,SE	19760528 200901 1 001	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Ekonomi
	Ternate,28 Mei 1976	P.337005		
20	Ratna Hamzah, SE	197909262010012006	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Ekonomi
	Manado, 26 September 1979			
21	Fadli Ismail, S.ip	19850523 201001 2 006	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Ilmu Pemerintahan
	Unjung Pandang, 23 Mei 1985	P.337031		
22	Siti Mukarramah,SE	19850523 201001 2 006	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Ekonomi
	Unjung Pandang, 23 Mei 1985			
23	Sari Rahayu,ST	19840706 201001 2 006	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Tehnik
	Ujung Pandang,6 Juli 1984	P.578250		
24	Sri Suwardini,SH	19821015 201001 2 005	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Hukum
	Ternate,15 Oktober 1982	P.578063		
25	Muhdirman, ST	19801005 201101 1 001	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Tehnik
	Ternate,05 Mei 1980	Q. 306722		
26	Tina Herlina,SE	19831118 201101 2 001	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Ekonomi
	Ternate, 18 Nopember 1983			
27	Atika Muid	19600425 199203 2 001	Penata Muda Tk.I - III/b	STM
	Bobanehena, 25 april 1960	G.054690		
28	Laksmi Safitri, ST	19840717 200801 2 010	Penata Muda Tk.I - III/b	Sarjana Tehnik
	Ternate,17 Juli 1984	P.089613		
29	Emilda Sofiatri Pontoh,ST	19830406 200604 2 014	Penata Muda - III/a	Sarjana Tehnik
	Ternate,6 April 1983	N.063901		
30	Farid Suhirto Azis, A.Md	19810610 200604 1 020	Penata Muda - III/a	Diploma III
	Ternate,10 Juni 1981	N.063771		
31	Moh.Usman Syah Alam, SH	197811042014071001	Penata Muda - III/a	Sarjana Hukum
	Jakarta,4 November 1978			
32	M. Fahmi Iskandar Alam, ST	199012082015021001	Penata Muda - III/a	Sarjana Tehnik
	Jakarta,08 Desember 1990			
33	Nurmi Mas:ud	19750617 200112 2 004	Pengatur Tk.I	SMA
	Ternate,17 Juni 1975	L.047206	II/d	
34	Handayani	19820608 200112 2 003	Pengatur	SMP
	Ternate,8 Juni 1982	L.047279	II/c	
35	Cindra Dj.Mokoagow,A.Md	19810113 201101 2 002	Pengatur	Diploma III
	Doloduo,13 Januari,1981		II/c	
36	Mubarakh	198112272005011005	Pengatur	SMA
	,27 Desember,1981		II/c	
37	Yasir Daud	19700308 2008801 1 013	Pengatur Muda Tk.I	SMA

	Ternate, 08 Maret 1970	P.089563	II/b	
38	Marhawa	19750425 200701 2 017	Pengatur Muda Tk.I	SMA
	Makian,25 April 1975	N.174693	II/b	
39	Nona	19780802 200901 2 001	Pengatur Muda Tk.I	SMA
	Ternate,2 Agustus 1978	P.337112	II/b	
40	Ahmad Hasan	19710727 200901 1 002	Pengatur Muda Tk.I	SMA
	Ternate,27 Juni 1971	P.337121	II/b	
41	Maknun Alhadi	19720728 201001 2 003	Pengatur Muda Tk.I	SMA
	Ternate,28 Juli 1972	P.	II/b	
42	Ricko	19860325 201001 1 002	Pengatur Muda Tk.I	SMA
	Ternate,25 Maret 1986	P.229929	II/b	

Sumber : Bappeda Kota Ternate

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa PNS di lingkungan Bappeda Kota Ternate didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikan Strata-1. Hal ini dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepegangatan dan tingkat pendidikan tersebut.

Untuk diketahui pada tahun 2011 masih terdapat 3 orang PNS di lingkungan Bappeda Kota Ternate, yang sedang mengikuti tugas belajar Program S2. Dengan demikian banyaknya staf yang meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka diasumsikan makin meningkat kualitas sumber daya manusia di Bappeda, sehingga diharapkan ke Depan dapat memperkuat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Ternate. Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Sebagaimana yang diatur ketentuan PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural diharuskan melalui kegiatan Diklat Penjurangan seperti ADUM, ADUMLA, SPAMA dan SPAMEN, maka untuk lingkungan Bappeda Kota Ternate, kondisi akhirnya adalah sebagai berikut : SPAMEN : 1 orang 2. SPAMA : 3 orang 3. ADUMLA : - orang 4. ADUM : 6 orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006, tentang mutasi dan adanya pengurangan jabatan struktural.